

PERGESERAN PERAN IDEOLOGI DALAM PARTAI POLITIK DI TEMPAT KERJA

Soly Gloria¹

Universitas Jambi, Indonesia

Email: nfdh14@gmail.com

ABSTRAK

Pasca reformasi terjadi perubahan besar pada sistem politik di Indonesia, terutama munculnya partai-partai politik. Perubahan asas tunggal dalam politik yang memberikan ruang bagi partai politik kecuali ideologi Pancasila. Kemudian dengan diadakannya pemilihan umum secara langsung konstituen pada pemerintah pusat atau daerah yang memberikan warna tersendiri pada politik. Di sisi itu, peserta pemilihan umum yang sedikit menyebabkan kecilnya peluang partai politik yang muncul untuk memperoleh suara mutlak dan hal ini akan menyulitkan partai-partai politik untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Pada kenyataannya koalisi tidak hanya antar partai yang memiliki ideologi yang sama, Sebagaimana kesimpulan sementara penulis kesimpulan sementara, figur menjadi sentral aktivitas politik karena partai politik lebih memperdagangkan figur daripada memperdagangkan program kerja sebagai daya tarik partai politik. .

Kata Kunci : Ideologi, Partai Politik

ABSTRACT

Post-reform there have been major changes to the political system in Indonesia, especially the emergence of political parties. Changes in the single principle in politics that provide space for political parties except the ideology of Pancasila. Then with the holding of direct elections of constituents to the central or regional government which gives its own color to politics. On the other hand, the small number of participants in the general election causes the small chances of political parties that emerge to obtain absolute votes and this will make it difficult for political parties to achieve or maintain power. In fact, coalitions are not only between parties that have the same ideology, As the author's provisional conclusion, figures become the center of political activity because political parties trade figures rather than trading work programs as the attraction of political parties.

Keywords: Ideology, Political Party

PENDAHULUAN

Setelah Reformasi, politik Indonesia mengalami perubahan di mana partai-partai yang sebelumnya dianggap tidak berpengaruh mulai memiliki kendali atas kekuasaan politik. Pada masa awal kemerdekaan, semangat politik yang tinggi tercermin dalam keberagaman partai politik dari berbagai latar belakang. Meskipun demikian, pada pemilihan umum pertama, demokrasi dianggap masih kokoh karena para pemimpin belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses politik. Namun, saat ini, campur tangan penguasa dalam pemilihan umum menjadi perhatian utama, dengan praktik seperti politik uang, manipulasi informasi, dan pengaruh terhadap penyelenggara pemilu. Persoalan utama dalam partai Demokrasi Indonesia semakin terlihat jelas.

Partai-partai tersebut seringkali terlibat dalam konflik internal, sehingga hal ini menjadi strategi pemerintah untuk melemahkan partai dan menghasilkan dukungan bagi rezim Soeharto. Konflik internal sering terjadi pada masa kepemimpinan Sanusi Harjadinata, dan berlanjut pada masa pemerintahan Harjant dan Suryadi. Meskipun demikian, kekuasaan dapat digunakan dalam politik di bawah sistem kepartaian. Peraturan ini memberikan otonomi yang signifikan kepada partai politik ketika antusiasme masyarakat terhadap politik masih tinggi pada tahap awal kemerdekaan. Menerapkan sila tunggal Pancasila sebagai ideologi berarti setiap individu bebas mengutarakan pendapatnya, setiap orang boleh mengutarakan pendapatnya tentang apa saja, dan masyarakat mendambakan sistem demokrasi yang ideal.

Ideologi

Menurut Mubyarto Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja (atau perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Menurut Frans Magnis Suseno, Ideologi dimaksud sebagai keseluruhan sistem berfikir dan sikap dasar rohaniah sebuah gerakan, kelompok sosial atau individu. Manfred Steger dan Paul James memiliki pendapat sama tentang ideologi. Menurut

mereka berdua ideologi adalah Sekelompok Ide dan konsep yang normatif yang memiliki pola, begitupun representasi dari kekuatan politik yang ada. Ideologi memiliki banyak arti argumen atau pemikiran persuasi untuk menentang pikiran yang bertolak belakang. Ideologi sangat mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, dari aspek pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, kesehatan, dll. Adanya gagasan dalam sebuah ideologi berawal dari ide/gagasan masyarakat yang mereka ingin wujudkan.

Diskusi tentang isu ekonomi tidak dapat disamakan dengan perbincangan mengenai kekayaan, distribusi, serta kebebasan dalam proses penciptaan kekayaan. Seperti yang disampaikan oleh Delianov (2006: 16), manusia merupakan makhluk rasional yang mendorong dirinya dengan kepentingan pribadi dalam menghasilkan, memperoleh, dan memperdagangkan barang dan jasa. Pertanyaan muncul mengenai apakah kekayaan manusia dapat dibatasi dalam upaya mencapainya, dan batasan apa yang harus ditetapkan. Distribusi kekayaan melibatkan berbagai kelas masyarakat yang terbagi menjadi kaya, kelas menengah, dan miskin, yang memiliki hubungan yang kompleks satu sama lain. Ideologi, sebagai kerangka perilaku sosial, mencakup pandangan tentang bagaimana masyarakat seharusnya diatur dan berfungsi. Ideologi memainkan peran yang signifikan dalam merasionalisasi kepentingan kelompok serta dalam mengatur sistem sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Ini dapat menimbulkan reaksi dan tindakan dalam kasus kebijakan yang dianggap bertentangan dengan norma sosial yang diinginkan, karena ideologi memiliki dimensi normatif, etis, dan moral yang kuat.

Partai Politik

Negara Indonesia merupakan negara demokratis yang menjalankan politik sebagai alur utama dalam sistem demokrasi. Papol dianggap sebagai motor utama dalam sistem demokrasi, memungkinkan masyarakat untuk merasa memiliki bagian dalam negara dan pemerintahan. Menurut definisi Carl J. Friedrich, partai politik adalah kelompok manusia terorganisir secara stabil dengan tujuan mengambil alih atau mempertahankan penguasaan atas pemerintahan untuk kepentingan partainya serta memberikan manfaat kepada anggotanya secara

materiil maupun idiil. Sementara menurut Sigmund Neumann, partai politik merupakan organisasi aktivis politik yang berusaha memenangkan kekuasaan pemerintahan dan mendapatkan dukungan rakyat melalui persaingan dengan kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik mendefinisikan partai politik sebagai organisasi nasional yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela, dengan kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan entitas yang didirikan oleh warga dengan dasar keyakinan pada nilai-nilai yang mereka idamkan untuk masyarakat. Organisasi ini bertujuan untuk merealisasikan aspirasi atau keinginan masyarakat melalui jalur politik yang legal dengan memperoleh kekuasaan di ranah politik. Dengan memiliki kekuasaan, masyarakat dapat dengan lebih mudah mewujudkan cita-cita mereka melalui kebijakan-kebijakan yang disusun.

Sosialisasi Politik

Merupakan proses pembentukan sikap dan arah pandangan politik oleh anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik, masyarakat akan memahami signifikansi politik beserta alat-alatnya. Sosialisasi politik menghasilkan budaya politik dalam bentuk perilaku politik yang konstruktif, menekankan pada pencapaian kesepakatan daripada penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan konflik, serta memiliki pertimbangan rasional dalam membuat keputusan atau memilih opsi tertentu. Perilaku semacam itu kemudian menjadi fondasi bagi pelaksanaan demokrasi.

Partisipasi Politik

Sosialisasi dan komunikasi politik menghasilkan pemahaman yang lebih jelas atau keterbukaan rasional dalam masyarakat terhadap aktivitas politik. Fungsi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masa depan

mereka. Nasib yang akan dihadapi di masa mendatang sangat bergantung pada tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang mengalokasikan nilai dan kebijakan untuk kepentingan masyarakat luas. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum serta dalam menentukan arah kepemimpinan pemerintah.

Komunikasi Politik

Komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat, serta sebaliknya, merupakan proses yang krusial dalam organisasi modern. Pemerintahan dapat mempertahankan kekuasaannya dengan memahami kebutuhan masyarakatnya. Banyak rezim di dunia yang runtuh karena kegagalan memahami kebutuhan masyarakat, yang menghasilkan ketidakpuasan dan akhirnya pergantian kekuasaan, baik melalui cara konstitusional maupun kudeta. Di sisi lain, masyarakat memerlukan informasi untuk menilai kinerja pemerintah dan pencapaian yang diinginkan. Partai politik berada di antara pemerintah dan masyarakat, sehingga posisinya sangat penting dalam dinamika tersebut. Terlepas dari apakah partai politik berada di kubu pemerintah atau oposisi, hal ini akan memengaruhi konten informasi yang disampaikan kepada masyarakat, terkait dengan sudut pandang atau nilai yang di perjuangkan.

Ideologi dan Partai Politik

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, ideologi merupakan elemen yang esensial bagi partai politik, karena ideologi tersebut membentuk identitas dan arah partai politik. Identitas ini mencakup arah kegiatan partai politik, pesan yang disampaikan kepada masyarakat, serta sikap dan orientasi politik yang diadopsi. Ideologi juga menjadi panduan dalam menangani isu-isu yang ada dalam masyarakat. Dalam ideologi, terdapat aspek-aspek formal dan ideal tentang bagaimana ekonomi dan politik dijalankan, serta bagaimana distribusi nilai-nilai akan dilakukan. Nilai-nilai tersebut mencakup kesejahteraan, pendidikan,

kesehatan, ketenangan, dan kenyamanan masyarakat yang diharapkan dicapai ketika partai tersebut berkuasa.

Dengan ideologi yang dimiliki, partai politik dapat memiliki identitas yang jelas, memudahkan mereka dalam memperoleh dukungan massa. Sebaliknya, masyarakat dapat lebih mudah memilih partai politik yang sejalan dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Namun, di tengah keberagaman partai politik saat ini, seringkali kita kesulitan dalam mengidentifikasi partai berdasarkan ideologi. Meskipun demikian, asas partai yang tercantum dalam AD/ART partai dapat memberikan petunjuk awal, walaupun hubungan antara asas tersebut dengan perilaku elit, pemilih, dan program partai seringkali tidak selaras. Asep Nurjaman mengelompokkan ideologi partai politik menjadi empat kategori, yaitu partai berideologi Islam, Nasionalis Sekuler, Nasionalis Religius, dan Kristen, dengan kriteria yang berbeda-beda. Namun, penggolongan ideologi partai politik seringkali menjadi perdebatan karena bergantung pada indikator yang digunakan. Misalnya, penggunaan istilah Islam dalam AD/ART dapat menandakan ideologi Islam, sementara penggunaan nilai-nilai agama dan moral dapat menunjukkan ideologi Nasionalis Religius. Demikianlah kompleksitas dalam mengkategorikan ideologi partai politik dalam konteks yang lebih luas.

Partai Politik dan Pemilu

Partai politik merupakan elemen kunci dalam proses pemilihan umum, yang terlibat dalam persaingan internal dan eksternal untuk memenangkan kekuasaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam teori politik, partai bersaing berdasarkan ideologi yang diimplementasikan melalui program-program partai, yang bertindak sebagai langkah konkret dalam mencapai visi masyarakat yang diinginkan. Persaingan antar partai, baik yang sudah ada sebelumnya maupun yang baru muncul, semakin menambah animo dalam proses pemilihan umum. Partai politik hadir dengan aspirasi dan impian untuk mencapai masyarakat yang diharapkan, dengan menawarkan berbagai program dan basis perjuangan yang beragam, termasuk di antaranya petani, buruh, atau nelayan, di perkotaan maupun di pedesaan. Fungsi utama partai politik adalah sebagai alat rekrutmen politik, yang

melibatkan seleksi dan penunjukan orang atau kelompok untuk berperan dalam sistem politik dan pemerintahan.

Kehadiran sistem pemilihan langsung, baik di tingkat nasional maupun daerah, meningkatkan signifikansi peran yang dimainkan oleh partai politik dalam proses perekrutan kader. Proses kaderisasi ini menghasilkan calon pemimpin yang telah terbukti baik dalam kemampuan organisasi maupun interaksi sosial. Partai politik menjadi tempat di mana kader-kader yang potensial dapat dihasilkan untuk menjadi pemimpin di level nasional maupun lokal. Peran pemimpin menjadi kunci dalam struktur organisasi negara, karena dari pemimpin tersebutlah keputusan-keputusan dibuat untuk mencapai tujuan negara. Kader partai mencerminkan ideologi partai, diharapkan bahwa ketika mereka menjadi pemimpin, kebijakan yang diambil sesuai dengan ideologi partai, tanpa adanya pertentangan. Kebijakan ini tidak hanya terbatas pada pemerintah pusat melalui presiden, tetapi juga termasuk gubernur, walikota, dan bupati. Otonomi daerah semakin meningkatkan peran daerah dalam mengatur urusan internal untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya sistem pemilihan langsung, partai politik memiliki kesempatan untuk menerapkan ideologi mereka melalui kepala daerah. Namun, dengan bertambahnya jumlah partai politik, masyarakat menjadi bingung dalam memilih partai yang mewakili kepentingan mereka. Kehadiran banyak partai membuat sulit bagi satu partai untuk memenangkan pemilu secara mutlak, sehingga koalisi menjadi strategi penting baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam teori, koalisi partai cenderung mencari kesesuaian ideologi, meskipun dalam prakteknya, koalisi sering terjadi atas dasar keuntungan politik. Di Indonesia, perbedaan antar partai semakin kabur, dengan munculnya fenomena partai yang mengombinasikan nasionalisme dan Islam. Koalisi partai bersifat jangka pendek untuk mendapatkan kekuasaan, bahkan jika melibatkan partai dengan ideologi berbeda. Meskipun demikian, koalisi sering kali mencerminkan arah kebijakan elit partai. Di tingkat pusat, terjadi koalisi antara partai yang berbeda, sedangkan di tingkat daerah,

kombinasi antara partai Islam dan nasionalis menjadi umum, tanpa harus mengikuti keseragaman ideologi.

KESIMPULAN

Dengan adanya pemilihan langsung untuk presiden, gubernur, walikota, dan bupati, politik Indonesia menjadi semakin hidup, dengan masyarakat terlibat lebih dalam dalam aktivitas politik, terutama dalam pemilu. Ideologi menjadi kurang diperhatikan dibandingkan dengan kepemimpinan personal, yang menjadi pertimbangan utama masyarakat ketika memilih, bukan lagi ideologi partai politik. Ini adalah hasil langsung dari pemilihan langsung, di mana kepemimpinan pribadi menjadi tujuan utama melalui partai politik untuk memperoleh kekuasaan politik.

Politik pencitraan menjadi dominan dalam upaya memenangkan dukungan dalam pemilu, didukung oleh peran besar media, baik cetak maupun elektronik. Meskipun media membantu masyarakat mengenal lebih dekat calon kandidat, sering kali mereka juga terjebak dalam pencitraan yang manipulatif. Ini seringkali menyebabkan kekecewaan di kalangan masyarakat. Di sisi lain, terjadi pergeseran dalam peran ideologi, di mana ideologi menjadi sekadar aksesori dari partai politik, kalah dengan kepentingan pribadi elit partai dalam jangka pendek. Banyaknya elit partai yang berpindah partai menunjukkan bahwa ideologi tidak lagi mengikat perilaku mereka. Fenomena ini membuat sulit untuk memilih calon yang tepat dalam pemilu, karena informasi yang diberikan seringkali disertai dengan pencitraan melalui media. Oleh karena itu, hati-hati dalam menentukan pilihan dalam pemilu sangatlah penting.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik; Mencangkup berbagai teori dan konsep ilmu politik yang komprehensif. Jakarta. Erlangga.

- Firmansyah. 2011, Mengelola partai politik, Komunikasi dan positioning ideologi politik di era demokrasi. Jakarta, Yayasan pustaka obor Indonesia.
- Hasibuan, A. S., & Sulistyono, D. (2018). Peranan Ideologi Dalamintergasi Nasional. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1-10.
- Nurjaman,Asep, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/126>
- Surbakti, Ramlan. 1992, Memahamilebih dasar Ilmu Politik, Jakarta. Grasindo.
- Syam, Firdaus, 2007. Pemikiran dalam Politik Barat. Jakarta. Bumi Aksara
- Syaukani, H et all, 2002. Otonomi Daerah dalam negara kesatuan, Yogyakarta, Pustaka Pelajarilmu politik
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politikdan Pemilihan umum